

**PENEGAKAN ATURAN TERHADAP ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA DALAM KASUS  
PUNGUTAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN  
2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

<sup>1</sup>Afif Ridhwan Putra, <sup>2</sup>Dr. H. IrmanJaya Taher SH, MH

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>1</sup>[afifridhwanputra99@gmail.com](mailto:afifridhwanputra99@gmail.com)

<sup>2</sup>[irman.jaya@esaunggul.ac.id](mailto:irman.jaya@esaunggul.ac.id)

**ABSTRAK**

Penegakan aturan terhadap Ormas PP dalam kasus Pungutan Liar di wilayah kabupaten tangerang berdasarkan Undang-Undang Ormas bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana Penegakan Aturan Ormas PP serta penerapan sanksi dalam kasus Pungutan Liar di wilayah kabupaten tangerang berdasarkan Undang-Undang Ormas dan memberikan masukan kepada Ormas PP, agar anggota Ormas PP bisa lebih memahami peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Ormas. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah normatif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti secara langsung bagaimana Penegakan Aturan serta penerapan sanksi terhadap Ormas PP dalam kasus pungutan liar di wilayah kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Ormas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Aturan Terhadap Ormas PP dalam kasus pungutan liar di wilayah kabupaten tangerang ini, Ormas PP sebagai Ormas belum berperan dan belum menjalankan kewajibannya menurut Undang-Undang Ormas, karena masih banyaknya anggota Ormas PP yang masih melakukan pungutan liar di wilayah kabupaten tangerang. Dalam penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila menurut Undang-Undang Ormas, dalam kasus pungutan liar yang dilakukan oleh anggotanya di daerah kabupaten tangerang itu sudah berjalan dengan baik. Karena Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila langsung memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan pungutan lair, dikarenakan sudah mencemarkan nama baik Ormas PP secara organisasi.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Penegakan Aturan, Ormas PP

## **ABSTRACT**

Enforcement of rules against PP Ormas in the case of Illegal Fees in the Tangerang Regency area based on the Ormas Law aims to provide information to the public about how to Enforce the PP Ormas Rules and the application of sanctions in the Illegal Charges case in the Tangerang Regency area based on the Ormas Law and provide input to PP Ormas, so that PP Ormas members can better understand the regulations contained in the Ormas Law. The method used in this research is normative. In this study, the researcher wanted to examine directly how the enforcement of the rules and the application of sanctions against PP Ormas in the case of illegal levies in the Tangerang district based on the Ormas Law. The results of this study indicate that Enforcement of Regulations Against PP Ormas in the case of illegal levies in the Tangerang Regency area, PP Ormas as Ormas have not played a role and have not carried out their obligations according to the Ormas Law, because there are still many PP Ormas members who still carry out illegal levies in the district. tangerang. In the application of the sanctions given by the Pancasila Youth National Leadership Council according to the Ormas Law, in the case of illegal levies carried out by its members in the Tangerang district, it has gone well. Because the Pancasila Youth National Leadership Council immediately gave sanctions to its members who carried out levies, because they had tarnished the good name of the PP Ormas as an organization.

Keywords: Illegal Fees, Enforcement of Rules, PP Ormas.